

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah Pengamatan

Tumbuhnya kesadaran global akan dampak berbahaya dari perubahan iklim, yang dapat memengaruhi semua aspek kehidupan manusia, mampu memotivasi negara-negara di seluruh dunia untuk menerbitkan rencana tujuan pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) memuat gagasan bahwa negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui strategi yang komprehensif. (Khamilia dan Nor, 2019). Keberlanjutan merupakan isu global, dengan meningkatnya masalah perubahan iklim akibat degradasi lingkungan hidup dan pembabatan hutan, menyebabkan polusi udara, air dan tanah, serta pembangunan yang tidak ramah (Bunga Novitasari et al., 2021).

*Sustainability report* yang berfokus atas konsep TBL sustainability yang diantaranya dari isu ekonomi, lingkungan dan sosial telah menjadi tindakan yang terlembagakan di organisasi, khususnya organisasi terbuka. Pelaporan keberlanjutan diawali pada tahun 1990-an dan masih baru dinilai dengan pelaporan keuangan wajib yang ada, tetapi untuk saat ini pelaporan keberlanjutan semakin menjadi persyaratan hukum dan tidak hanya praktik sukarela. (Putri et al., 2022). Perusahaan tidak hanya harus menyusun laporan keuangan sesuai standar, tetapi juga memperhatikan biaya lingkungan. Perusahaan dituntut tidak hanya melakukan kegiatan untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan sosial (Tusiyati, 2019). Meski demikian, peraturan yang mengharuskan penggunaan format standar dalam penulisan pengungkapan belum ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, beberapa organisasi beranggapan bahwa keterbukaan informasi lingkungan tetap bersifat sukarela.

Suatu organisasi biasanya mengikuti Inisiatif Pelaporan Global, yang juga dikenal sebagai GRI, ketika menyiapkan pengungkapan lingkungan

hidup. Sebuah kelompok nirlaba internasional bernama GRI berupaya menyelaraskan prosedur penyambutan. Sebuah organisasi atau bisnis dapat menunjukkan kinerja dan pengaruh yang mencakup elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam situasi ini. GRI dapat digunakan sebagai dasar atau panduan dalam membuat Laporan keberlanjutan (Ardi, 2020).

Pentingnya mutu lingkungan dan penjagaan kesehatan manusia membuat organisasi mengamati lebih efek yang dihasilkan melalui aktivitas yang organisasi jalankan terhadap lingkungan. Beberapa perusahaan, terutama yang bergerak di sektor lingkungan didorong untuk mengambil kebijakan yang melibatkan tugas organisasi kepada para pemangku kepentingan, terutama dalam bidang lingkungan dikarenakan adanya permintaan yang semakin meningkat oleh masyarakat. Perusahaan dapat menggunakan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan sebagai perantara mengungkapkan kegiatan lingkungan serta untuk menunjukkan akuntabilitasnya kepada pemangku kepentingan. Meluasnya masalah lingkungan mendorong banyak pihak yang baik dari internasional ataupun nasional untuk menangani masalah tersebut.

Meningkatnya kegiatan bisnis perusahaan tidak hanya berdampak positif tetapi seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan sosial. Salah satu dampak negatif yang seringkali berdampak langsung pada masyarakat dan dunia usaha adalah fenomena kerusakan lingkungan. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang pesat menyebabkan perusahaan mengkonsumsi sumber daya secara berlebihan dan akibatnya wilayah tersebut menghadapi masalah kerusakan lingkungan yang cukup parah. Dapat dilihat bahwa banyak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan yang keberadaannya merugikan masyarakat. Masyarakat sering menjadi pihak yang paling terkena dampak dalam proyek perusahaan, dan perusahaan sering menghindari atas timbulnya kerugian pada lingkup masyarakat tersebut.

Aktivitas operasional organisasi dapat memunculkan kehancuran lingkungan membuat terbatasnya transparansi informasi lingkungan. Contohnya bersumber pada laman resmi berita dari situs web [kompas.com](https://www.kompas.com)

yaitu permasalahan Sungai Citarum di Jawa Barat. Pembuangan liar limbah cair ke Daerah Aliran Sungai Citarum menjadi aktor utama pencemaran itu terjadi. Mayoritas perusahaan tersebut bergerak di sektor tekstil, kertas serta makanan. Perihal ini mengakibatkan adanya situasi pembusukan dan air sungai menghitam (Kompas, 2023). Selain itu PT KCN melakukan pencemaran lingkungan akibat abu batu bara di Marunda. Akibat dari kegiatan organisasi berpengaruh negatif terhadap lingkungan dan kesehatan warga Marunda. Warga di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda mengalami gangguan kesehatan, seperti gatal-gatal dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, karena terdampak abu batu bara (Kompas, 2023), dan masih banyak kasus kerusakan lingkungan lainnya. Dugaan terjadinya kasus-kasus tersebut disebabkan oleh kelalaian perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan tempat mereka melakukan kegiatan industri. Melihat kejadian tersebut, jelas bahwa Indonesia masih mengalami darurat ekologis, yaitu krisis yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Kegiatan pengaturan kekayaan alam yang tidak sesuai dengan lingkungan dan rendahnya kesadaran korporasi akan perlunya pelestarian lingkungan hidup menjadi penyebab hilangnya sumber daya kelangsungan hidup masyarakat, khususnya sumber penghidupan.

Beberapa fenomena yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya yaitu tingginya kasus kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan perseteruan antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar lingkungan perusahaan akibat dari aktivitas atau operasional perusahaan yang mengganggu masyarakat sekitar dan mencemari lingkungan dengan limbah perusahaan. Indonesia menjadi negara peringkat teratas sebagai negara yang berpolusi buruk akibat dari pencemaran udara. Pengungkapan laporan keberlanjutan bersifat wajib, namun pengungkapan poin-poin di dalamnya masih bersifat sukarela. Seluruh fenomena tersebut mempunyai keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain.

Peran penting regulasi dalam mendorong kualitas keterbukaan penjelasan lingkungan oleh organisasi di Indonesia seharusnya tidak bisa

diabaikan. Hal ini diharapkan dapat memotivasi perusahaan-perusahaan untuk aktif dalam melakukan keterbukaan penjelasan lingkungan. Akan tetapi, keterbukaan penjelasan lingkungan perusahaan masih belum dilakukan secara maksimal dalam pelaksanaannya di Indonesia, apabila dilihat dari berbagai hasil penelitian tentang pelaporan lingkungan. Berikut beberapa hasil penelitian pengungkapan lingkungan:

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Rata-Rata Pengungkapan Lingkungan**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Pengungkapan Lingkungan (%)	Objek Penelitian
1.	(Ardi, 2020)	41,56	Perusahaan di sektor pertambangan dan pertanian yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018
2.	(Purwanto & Nugroho, 2020)	23,00	Perusahaan pertambangan dan barang konsumsi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2018
3.	(Putra & Utami, 2018)	40,13	Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di BEI
4.	(Juniartha & Dewi, 2019)	43,65	Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016.
5.	(Chanifah, 2019)	14,30	Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017

Sumber: Jurnal ilmiah, diolah peneliti (2023)

Pada dasarnya pengungkapan lingkungan berguna tidak pada masyarakat saja, namun pada organisasi juga karena bisa menghasilkan profit di masa depan. Profit yang akan dirasakan organisasi salah satunya

ialah sehubungan dengan tingkat keyakinan yang dihasilkan oleh para pihak berkepentingan kepada organisasi tersebut.

Urgensi pelaporan informasi lingkungan perusahaan dapat dilihat sebagai hal yang penting bagi masyarakat. Dikarenakan masyarakat merupakan pihak yang akan berpartisipasi langsung terhadap lingkungan yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Saat ini, pengungkapan lingkungan hidup suatu perusahaan sangat erat kaitannya dengan pelaporan keberlanjutannya. Laporan ini dianggap satu-satunya laporan saat ini yang memiliki hubungan langsung antara perusahaan dan lingkungan bisnis saat ini. *National Center for Sustainable Development Report* (NCSR) merupakan organisasi independen pertama yang akhirnya mengembangkan pelaporan keberlanjutan di Indonesia (Fabiana Meijon Fadul, 2019). Jika ditelusuri lebih dalam, kita melihat sudah ada nama-nama perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutannya. Tabel berikut menyajikan hasil pemeringkatan nama-nama perusahaan penerbit laporan keberlanjutan menurut *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) periode 2022.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Peringkat ASRRAT 2022**

No	Nama Perusahaan	Peringkat
1	PT Bank BTPN Tbk	Platinum
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
3	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk	
4	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
5	PT Bio Farma (Persero)	
6	PT Indonesia Power	
7	PT Petrokimia Gresik	
8	PT Pupuk Indonesia (Persero)	
9	PT Pupuk Kalimantan Timur	
10	PT ABM Investama Tbk	Gold
11	PT Agincourt Resources	
12	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	
13	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	
14	PT Badak LNG	

15	Bank Asia Limited	
16	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
17	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	
18	BPJS Ketenagakerjaan	
19	PT Bukit Asam Tbk	
20	PT Cikarang Listrindo Tbk	
21	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	
22	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	
23	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	
24	PT Indonesia Infrastructure Finance	
25	PT MRT Jakarta (Perseroda)	
26	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	
27	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	
28	PT Perkebunan Nusantara X	
29	PT Pertamina (Persero)	
30	PT Pertamina Drilling Services Indonesia	
31	PT PLN Nusantara Power	
32	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	
33	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	
34	Standards Bank Limited	
35	PT TIMAH Tbk	
36	PT United Tractors Tbk	
37	Universitas Brawijaya	
38	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	
39	PT Kideco Jaya Agung	
40	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	
41	Nickels Industries Limited	Silver
42	PT Patra Drilling Contractor	
43	Perum Jasa Tirta II	
44	Perum LPPNPI (Airmav Indonesia)	
45	SM PRIME	
46	Universitas Negeri Jember	
47	PT Pertamina Gas	Bronze

Sumber: Diolah peneliti, daftar peringkat ASRRAT 2022

Berdasarkan data di atas, pengungkapan laporan informasi lingkungan saat ini masih minim pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hanya 47 perusahaan dari 825 perusahaan (data BEI tahun 2022) yang melakukan pengungkapan lingkungan berdasarkan peringkat ASRRAT di atas. Meski mengetahui bahwa perusahaan yang terdaftar di

BEI merupakan perusahaan yang bersedia ikut serta dalam masyarakat atau perusahaan yang kepemilikan mayoritasnya dipegang oleh publik, namun mereka masih enggan mengungkapkan laporan lingkungan.

Dengan dilaporkannya informasi lingkungan, ini akan memudahkan pihak-pihak terkait untuk mengakses dan menambah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sah secara langsung dari organisasi yang bersangkutan. Perusahaan akan dianggap memiliki tingkat transparansi yang tinggi terhadap *stakeholder* apabila perusahaan melaporkan informasi tersebut. Oleh karena itu, *stakeholder* tidak ada alasan untuk meragukan kinerja dan kualitas perusahaan tersebut karena perusahaan telah menguraikan secara terperinci dalam laporan yang ada mengenai hal yang terkait dengan operasional, termasuk aspek keuangan dan lingkungan. Namun pada praktiknya, masih ada banyak perusahaan yang belum mengoptimalkan manfaat dari pengungkapan laporan lingkungan ini. *Stakeholder* akan menuntut perusahaan mengambil tindakan berupa pertanggungjawaban atas dampak kegiatannya dan upaya perusahaan untuk mengatasi dampak tersebut (Rahmasari, n.d.). Hal ini dapat terwujud dengan cara perusahaan mampu melaporkan kualitas pengungkapan informasi lingkungan.

Mutu keterbukaan informasi lingkungan ialah sejauh keterbukaan terhadap penjelasan lingkungan yang ada pada publik dan bisa menggambarkan sejauh mana organisasi bisa mengungkapkan informasi lingkungan yang berkualitas serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan investor. Kualitas keterbukaan penjelasan lingkungan mengacu pada seberapa luas perusahaan dapat melaporkan informasi lingkungan, semakin luas dan lengkap pengungkapan informasi lingkungan, maka akan semakin naik kualitas keterbukaan penjelasan lingkungan pada organisasi. Keterbukaan lingkungan dapat dilakukan dengan mengurangi beban yang terkait secara langsung dengan lingkungan perusahaan dan sebaliknya perusahaan masih bisa secara langsung menciptakan kualitas informasi lingkungan yang baik meskipun dengan adanya pengurangan pada beban lingkungan tersebut. Pengamatan ini mengamati penyebab-penyebab yang

menentukan atau merajai mutu kerterbukaan penjelasan lingkungan di Indonesia dengan variabel independennya ialah kepemilikan institusional, financial slack, dan ukuran perusahaan.

Pada umumnya struktur kepemilikan yang ada di perusahaan dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi lingkungan pada organisasi, salah satunya yaitu struktur kepemilikan institusional. Struktur kepemilikan institusional mempunyai dampak yang cukup penting bagi perusahaan karena besaran tingkatan kepemilikan institusional akan memengaruhi pengawasan operasional perusahaan. Tingkat kualitas keputusan dan tanggung jawab yang tercermin dalam laporan perusahaan, termasuk laporan pengungkapan lingkungan dipengaruhi dengan adanya kehadiran institusi dengan kepemilikan saham yang substansial di sebuah organisasi. Dengan demikian, bisa diringkas bahwa kepemilikan institusional berperan relevan terhadap pengungkapan informasi lingkungan perusahaan (Terry & Asrori, 2021).

Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi lingkungan. Salah satu sumber daya yang dimaksud dapat dikaitkan dengan *financial slack*. *Financial slack* adalah kondisi ketika ketersediaan sumber daya organisasi yang dipakai dalam menyesuaikan dengan perubahan keadaan, baik perubahan dari tantangan di dalam maupun luar organisasi melebihi kebutuhan perusahaan tersebut. *Financial slack* nantinya akan berperan dalam bagaimana perusahaan menentukan kebijakan berdasarkan kondisi yang ada, yang kemudian dapat mempengaruhi kualitas dari pengungkapan lingkungan (Fabiana Meijon Fadul, 2019). Ketersediaan keuangan tersebut akan digunakan perusahaan untuk membiayai berbagai biaya untuk pengembangan perusahaan.

Selain *financial slack*, ukuran organisasi ialah salah satu aspek yang bisa memberi dampak bagaimana tingkatan kualitas dari pengungkapan informasi lingkungan organisasi. Skala organisasi ialah skala naik rendahnya suatu organisasi yang dapat ditentukan dengan indikator untuk menilai perusahaan. Ukuran perusahaan memiliki kesan positif terkait kualitas pengungkapan informasi lingkungan. Dikaitkan dengan ilmu



legitimasi, organisasi yang lebih naik akan menghadapi tantangan yang lebih besar serta biasanya cenderung mengungkapkan informasi terkait aktivitas bisnis dan non-bisnis yang dilakukan untuk memperoleh legitimate atau mempertahankan citra dan reputasi perusahaan dalam lingkungan masyarakat (Purwanto & Nugroho, 2020). Perusahaan yang besar dengan lebih banyak pihak berkepentingan akan mengalami tekanan yang lebih besar dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah munculnya opini negatif. Adapun pilihan cara yang dilaksanakan Perusahaan yaitu meneruskan transparansi informasi lingkungan yang lebih luas dan berkualitas (Julianto & Sjarief, 2016).

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, disarankan agar peneliti melihat kepemilikan institusional, *financial slack*, dan ukuran perusahaan untuk mengetahui indikator-indikator yang memberi dampak pada kualitas keterbukaan informasi lingkungan. Hal ini semakin didukung dengan masih adanya kesenjangan pengamatan pada pengamatan-pengamatan terdahulu akibat beragamnya temuan pengamatan, sehingga mendorong peneliti untuk memperoleh validitas penelitian dengan melakukan penelitian tambahan. Kualitas keterbukaan informasi lingkungan hidup menjadi subjek penelitian kepemilikan institusional oleh (Terry & Asrori, 2021) dan (Kokasih, 2019) dengan hasil ialah kepemilikan institusional berdampak positif pada kualitas keterbukaan penjelasan lingkungan. Pengamatan serupa juga pernah dilakukan oleh (Zullaekha & Susanto, 2021) dan (Solikhah & Winarsih, 2016) dengan hasil bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif pada kualitas keterbukaan penjelasan lingkungan.

Pengamatan terkait *financial slack* pada kualitas keterbukaan informasi lingkungan pernah dilaksanakan oleh Anggraeni & Djakman (2017) dengan hasil bahwa *financial slack* berdampak positif terhadap kualitas keterbukaan penjelasan lingkungan. Pengamatan serupa juga pernah dilakukan oleh Tasya & Cheisviyanny (2019) dengan hasil bahwa *financial slack* berdampak negatif terhadap kualitas keterbukaan penjelasan lingkungan.

Pengamatan terkait ukuran perusahaan pada kualitas keterbukaan penjelasan lingkungan pernah dilaksanakan oleh (Friendty & Anita, 2022); (Purwanto & Nugroho, 2020) dan (Julianto & Sjarief, 2016) dengan hasil bahwa ukuran organisasi berdampak positif pada kualitas keterbukaan penjelasan lingkungan. Pengamatan serupa juga pernah dilaksanakan oleh (Sayuti et al., 2021) dan (Ngu & Amran, 2021) dengan hasil bahwa ukuran organisasi berdampak negatif terhadap kualitas keterbukaan penjelasan lingkungan.

Peneliti tertarik untuk membahas mengenai apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional, *financial slack*, dan ukuran organisasi pada kualitas keterbukaan informasi lingkungan. Hal tersebut ditujukan untuk organisasi yang tercatat dan tercantum di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode 2018 hingga 2022 melalui merujuk pada organisasi sektor tambang. Sektor ini dipilih untuk digunakan pada penelitian karena sektor tambang memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan. Perusahaan sektor tambang merupakan perusahaan yang aktivitas operasinya berpotensi besar terhadap kerusakan lingkungan sehingga perusahaan sektor pertambangan menjadi sorotan dari masyarakat. Apabila kegiatan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, maka perusahaan tersebut dapat mempengaruhi lingkungan sekitar selama menjalankan operasinya, perusahaan juga berisiko kehilangan izin beroperasi dan akan menerima banyak tuntutan dari masyarakat sekitar dan LSM lingkungan hidup yang akan mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi besar. Sektor ini juga dipilih dalam penelitian dikarenakan melihat adanya data sebelumnya bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi selama tahun 2018 sampai dengan 2022 didominasi terjadi akibat adanya perusahaan atau kegiatan operasional industri tambang disekitar lingkungan masyarakat. Selain itu, selama periode 2018 sampai dengan 2022 bahwa terjadi penurunan tingkat ketaatan perusahaan dalam mengungkapkan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga, perusahaan diharapkan untuk lebih memperhatikan tanggung jawab lingkungan. Berkaitan pada ilmu legitimasi, organisasi sektor tambang akan lebih melakukan pengungkapan informasi

lingkungan yang berkualitas guna memvaliditas aktivitas operasinya serta dapat meminimalisir tantangan dari aktivisi sosial dan lingkungan (Solikhah & Winarsih, 2016). Organisasi di bidang ini juga wajib melaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan terkait pola pertanggungjawaban sosialnya, hal tersebut diatur dalam UU PT. Organisasi yang menjadi peserta yang tepat diekspetasikan dalam memajukan konsisten mereka pada keterbukaan lingkungan.

Dalam penulisan pengamatan ini, peneliti tertarik guna mengembangkan pengamatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh (Sayuti et al., 2021) yang memfokuskan pada penelitian mengenai bagaimana pengaruh profitabilitas dan ukuran organisasi pada keterbukaan lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa baik variabel profitabilitas maupun variabel ukuran perusahaan tidak memiliki dampak terhadap keterbukaan lingkungan. Indikator dependen merupakan tempat persamaan yang diidentifikasi pengamatannya berada. Variabel terikat yang digunakan berkaitan dengan topik pengungkapan lingkungan hidup dan perbedaan pengamatan saat ini dengan pengamatan terdahulu. Misalnya saja pengamatan-pengamatan terdahulu yang memakai sampel organisasi pertambangan dan manufaktur yang tercantum di Bursa Efek Indonesia periode 2018, sedangkan pengamatan ini lebih pada pengumpulan data dari perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan.

Pengamatan sebelumnya memilih dua faktor independent yaitu profitabilitas dan ukuran organisasi sebagai variabel utamanya. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti tertarik untuk menggunakan tiga indikator independen, yang terdiri dari kepemilikan institusional, senjangan keuangan, dan skala organisasi. Hanya terdapat satu variabel independen yang sama seperti pada penelitian-penelitian sebelumnya dimana variabel ukuran perusahaan juga digunakan. Judul yang disarankan penulis adalah **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Financial Slack*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Keterbukaan Informasi Lingkungan Hidup”** dengan studi kasus pada organisasi sektor pertambangan jangka

waktu 2018–2022, berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan di atas.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Perdebatan penelitian ini mampu dirumuskan berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan di atas sebagai berikut:

1. Adanya kasus-kasus kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas perusahaan membuat para regulator membentuk peraturan yang mewajibkan tiap organisasi yang tercantum di Bursa Efek Indonesia dalam melaporkan laporan keberlanjutan.
2. Adanya investor institusional dalam perusahaan mengharuskan manajemen dalam memutuskan keputusan tidak berpacu berdasarkan profit dalam waktu pendek saja namun juga harus memperhatikan dalam pengungkapan lingkungan yang berkualitas.
3. Perusahaan yang memiliki *financial slack* tinggi sebaiknya dapat mengoperasikan kegiatan pengungkapan lingkungan yang lebih banyak disandingkan organisasi yang mempunyai *financial slack* dalam jumlah yang sedikit.
4. Perusahaan yang skalanya besar sebaiknya dapat lebih banyak mengungkapkan informasi lingkungan dari pada perusahaan yang mempunyai skala kecil.

## 1.3 Batasan Masalah

Dalam pengamatan ini, peneliti membataskan ruang lingkup pengamatan hanya pada dampak Kepemilikan Institusional, *Financial Slack*, dan Ukuran Organisasi pada Taraf Pengungkapan Informasi Lingkungan pada Organisasi Sektor Pertambangan Periode 2018 sampai dengan 2022. Pembatasan perdebatan ini dirumuskan guna nantinya penjelasan menjadi terarah dan mudah dipahami.

## 1.4 Perumusan Masalah Pengamatan

Didasarkan pemaparan-pemaparan diatas maka mampu dirumuskan mana permasalahan utama dalam pengamatan ini yaitu.

1. Apakah Kepemilikan Institusional mempunyai dampak terhadap Kualitas Keterbukaan Informasi Lingkungan pada Organisasi Sektor Pertambangan periode 2018-2022?
2. Apakah *Financial Slack* memiliki pengaruh terhadap Taraf Keterbukaan Informasi Lingkungan pada Organisasi Sektor Pertambangan periode 2018-2022?
3. Apakah Ukuran Organisasi mempunyai dampak terhadap Kualitas Keterbukaan Informasi Lingkungan pada Organisasi Sektor Pertambangan periode 2018-2022?

### 1.5 Maksud Pengamatan

Maksud pengamatan ini adalah sebagai berikut berdasarkan uraian masalah yang dikemukakan di atas:

1. Guna menganalisa dampak Kepemilikan Institusional pada Kualitas Keterbukaan Penjelasan pada Organisasi Sektor Pertambangan periode 2018-2022.
2. Guna menganalisa dampak *Financial Slack* pada Kualitas Keterbukaan Informasi Lingkungan pada Perusahaan Sektor Pertambangan periode 2018-2022.
3. Guna menganalisis dampak Ukuran Organisasi pada Kualitas Keterbukaan Informasi Lingkungan pada Organisasi Sektor Pertambangan periode 2018-2022.

### 1.6 Manfaat Hasil Pengamatan

Faedah teoritis dan praktis berikut diharapkan dari temuan penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Pengamatan ini diekspektasikan mampu dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan berkontribusi terhadap pengembangan teori secara umum maupun pengembangan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah di jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Selain itu, pengamatan ini juga diekspektasikan turut berkontribusi dalam pengembangan keilmuan akuntansi. Serta konsistensi variabel-

variabel yang dapat memengaruhi kualitas pengungkapan informasi lingkungan.

Selain itu, pengamatan ini dapat memberikan gambaran perihal dampak Kepemilikan Institusional, *Financial Slack* dan Skala Organisasi terhadap Taraf Keterbukaan Informasi Lingkungan. Melalui pengamatan ini, peneliti juga dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)

Pengamatan ini diekspetasikan mampu memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu terutama pada Fakultas Ekonomi dan untuk pengembangan pengamatan di masa mendatang. Serta melalui pengamatan ini diharapkan Undiksha dikenal sebagai institusi yang memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas.

### b. Bagi *Stakeholder*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi untuk mempertimbangkan dalam mengambil kebijakan mengenai kualitas pengungkapan informasi lingkungan dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan. Selain itu, adanya pengungkapan informasi lingkungan yang berkualitas dapat menjadi bentuk komunikasi mengenai tanggung jawab perusahaan dan transparansi kepada *stakeholder* terhadap permasalahan lingkungan hidup.

### c. Bagi Manajemen Organisasi

Penjelasan terkait dampak kepemilikan institusional, *financial slack*, dan skala organisasi terhadap kualitas keterbukaan informasi lingkungan rencananya akan diberikan kepada manajemen organisasi melalui pengamatan ini. Sehingga ketika dipertemukan kasus yang sama maka manajemen dapat menggunakan sebagai acuan untuk mendorong entitas agar dapat lebih empati dan lebih meningkatkan kembali bagian

manajemen serta akuntansi yang ada untuk lebih mengedepankan persoalan lingkungan alam.

d. Bagi Investor

Pengamatan ini diekspetasikan mampu memberikan informasi untuk para calon penanam modal dan investor guna dapat memberikan informasi lebih kepada investor untuk memahami faktor yang berdampak terhadap kualitas keterbukaan informasi lingkungan agar nantinya investor dapat lebih seksama dalam pengambilan keputusan investasi terkait. Sehingga mampu menentukan dengan efisien dan mengamati indicator-indikator makro ekonomi disamping faktor fundamental organisasi saja

e. Bagi Masyarakat

Pengamatan ini diekspektasikan mampu dimanfaatkan sebagai alat penjelasan dan pengetahuan tambahan terkait kualitas keterbukaan informasi lingkungan bagi masyarakat sekitar karena berhubungan langsung dengan kelestarian lingkungan masyarakat

